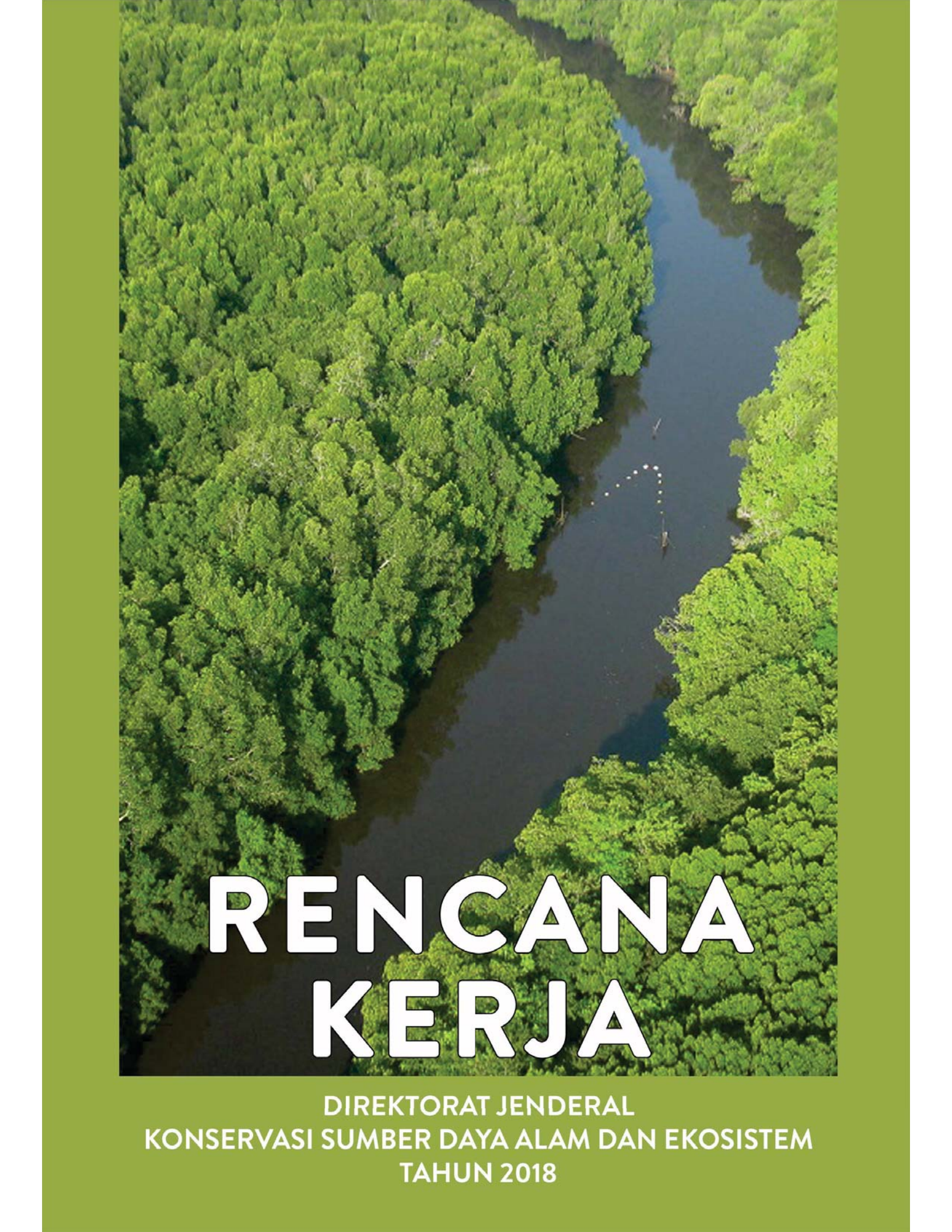


An aerial photograph showing a winding river with dark water, surrounded by a thick, vibrant green forest. The river flows from the top right towards the bottom left. In the middle of the river, there is a small cluster of white buoys or markers. The entire image is framed by a solid green border.

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2018

RENCANA KERJA

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM**

**JAKARTA
2017**

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2018

Tim Penyusun:

Pengarah : Direktur Jenderal KSDAE
Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
ISBN : 978-602-50663-1-3
Ketua : Kepala Bagian Program dan Evaluasi Setditjen KSDAE
Penyunting : Kepala Subbagian Program dan Anggaran
Desain Grafis : Staf Subbagian Program dan Anggaran
Ilustrasi Cover : Lugi Hartanto (TN Alas Purwo)
Penerbit : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
Penulis : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc.
Bambang Suriyono, S.Hut., M.Ec. Dev. MA
Marwedhi Nurratyo, S.Hut., M.T., M.Sc
Roby Rajani Nurzaini, S.Si., M.M.
Rizka Dewi Zuleika, S.T.
Ernatia Wati, S.T.

Diterbitkan oleh :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437
Email: pa.helpmail@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor: P.7/KSDAE/SET/REN.2/10/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amendemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia...

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,



Ir. WIRATNO, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Nomor: P.7/KSDAE/SET/REN.2/10/2017

TENTANG

**RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2018**

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2018 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 17 Oktober 2017

Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem,



1. WIRATNO, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang, Tujuan Dan Sistematika	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	4
Kedudukan	4
Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi dan SDM	5
Struktur Organisasi	5
Sumber Daya Manusia	7
BAB II	12
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017	12
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017 ...	12
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017	17
BAB III	20
RENCANA KERJA TAHUN 2018	20
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	20
B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	21
BAB IV	25
PENUTUP	25

Daftar Tabel

Tabel 1. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016.....	7
Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	9
Tabel 3. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016	9
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016	10
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2016	13
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Program Ditjen KSDAE Tahun 2017	14
Tabel 7. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan	17
Tabel 8. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Tanggal 13 Oktober 2017 Berdasarkan Kegiatan	18
Tabel 9. Rincian Pagu Anggaran Ditjen KSDAE 2018 per Kegiatan	23
Tabel 10. Pagu Indikatif Tahun 2018 Ditjen KSDAE per Jenis Belanja & Sumber Dana	24

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2016	8
Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016	8
Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016	10
Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016.	10
Gambar 6. Persentase Jenis Belanja Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2018	24
Gambar 7. Prioritas Nasional dan kegiatan lainnya yang didukung Ditjen KSDAE pada RKP 2018.....	24

Ringkasan Eksekutif

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Saat ini pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk mencapai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018. Renja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Renja Direktorat Jenderal Tahun 2018 disusun Ditjen KSDAE sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Sasaran program tersebut diindikasikan pencapaiannya dengan sembilan indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2018, sebagaimana pagu anggaran tahun 2018, direncanakan sebesar Rp 2.033.159.356.000,- (dua trilyun tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Tujuan Dan Sistematika

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati,

maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018. Renja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan. Renja Direktorat Jenderal Tahun 2017 disusun dengan mengacu KSDAE pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2015, menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang pengarah.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***".

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan misi: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun norma pembangunan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: (1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 (Nawa Cita).

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut.

Kedudukan

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

- penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi dan SDM

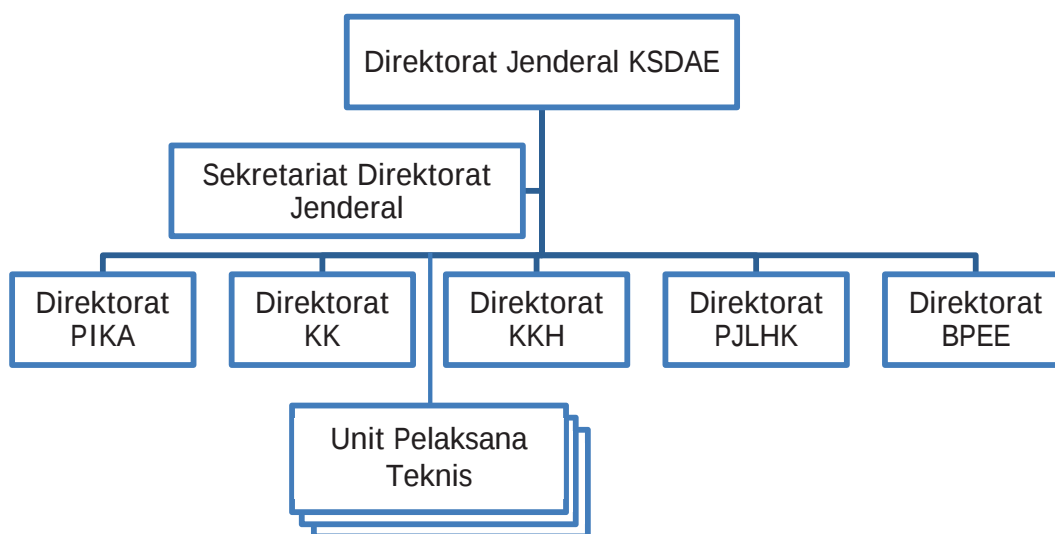
Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, Ditjen KSDAE dibantu oleh enam Eselon II Pusat, yaitu :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- c. Direktorat Kawasan Konservasi;
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
- f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat Eselon III), yaitu sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a. Balai Besar KSDA | : 8 UPT |
| b. Balai Besar Taman Nasional | : 8 UPT |
| c. Balai KSDA | : 18 UPT |
| d. Balai Taman Nasional | : 40 UPT |



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan di lingkup Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, terdiri dari:

1. **Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam;
2. **Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
3. **Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik;
4. **Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;

5. **Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
6. **Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan;
7. **Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional; serta
8. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.** Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Ditjen KSDAE didukung pegawai sebanyak 7.133 orang. Penyebaran pegawai pada Ditjen KSDAE adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016

Satker	Jumlah Pegawai	%
Pusat	396	5,55
BB/BKSDA	3.087	43,28
BB/BTN	3.650	51,17
Total	7.133	100,00

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2016

Perkembangan pegawai dalam lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, jumlah pegawai Ditjen KSDAE terbanyak pada tahun 2012 dengan jumlah 8.327 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 7.133 orang. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2016 mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 terdapat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana pada Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dipecah menjadi tiga Eselon I yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK). Sehingga pegawai dari Ditjen PHKA dipecah juga pada tiga Eselon I tersebut, dan mengakibatkan turunnya jumlah pegawai pada Ditjen KSDAE.

Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

	S3	S2	S1/D4	D3	SMU/D1/D2	SLTP	SD	JUMLAH
PUSAT	4	105	130	44	101	6	6	396
UPT	11	434	1816	427	3811	139	99	6737
JUMLAH	15	539	1.946	471	3.912	145	105	7.133
%	0,21	7,56	27,28	6,60	54,84	2,03	1,47	100

Sumber: Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

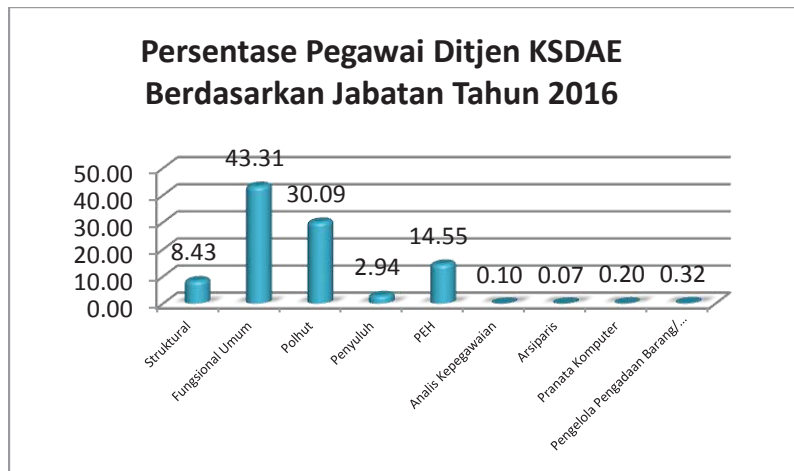
Berdasarkan tabel di atas, pegawai lingkup Ditjen KSDAE masih didominasi dari lulusan SMU/D1/D2 sebanyak 3.912 orang (54,84%), terbanyak kedua adalah lulusan S1/D4 sebanyak 1.946 orang (27,28%), sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan S3 sebanyak 15 orang (0,21%).

Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional umum yang mencapai 3.089 orang (43,31%) diikuti Polisi Hutan sebesar 2.146 orang (30,09%). Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum terbit. Gambaran komposisi pegawai lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan jabatannya terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	601	8,43
2	Fungsional Umum	3.089	43,31
3	Polhut	2.146	30,09
4	Penyuluh	210	2,94
5	PEH	1.038	14,55
6	Analisis Kepegawaian	7	0,10
7	Arsiparis	5	0,07
8	Pranata Komputer	14	0,20
9	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	23	0,32
	Jumlah	7.133	100

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017



Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

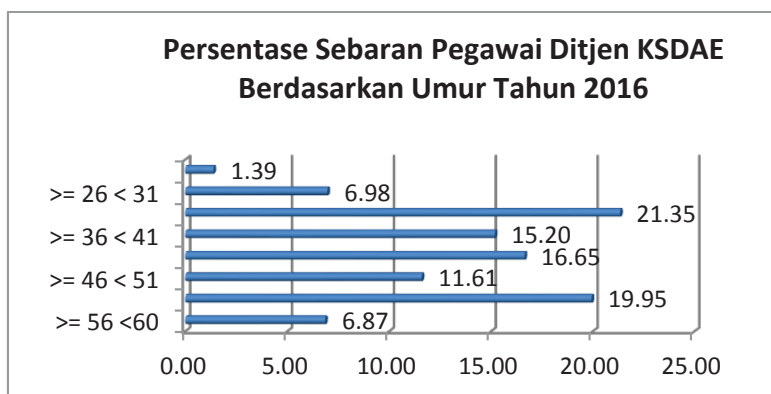
Dilihat dari komposisi umur, komposisi tertinggi jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE adalah pada umur 31 - 36 tahun sejumlah 1.523 orang (21,35%). Sedangkan komposisi terendah ada pada umur 21 - 26 tahun sejumlah 99 orang (1,39%). Berdasarkan komposisi umur, kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE disajikan sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016

	>= 56 <60	>= 51 < 56	>= 46 < 51	>= 41 < 46	>= 36 < 41	>= 31 < 36	>= 26 < 31	>= 21 < 26	Jumlah
Pusat	47	113	42	45	53	66	28	2	396
UPT	443	1.310	786	1.143	1.031	1.457	470	97	6.737
Jumlah	490	1.423	828	1.188	1.084	1.523	498	99	7.133

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

Sebaran pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016

Jumlah pegawai tersebut masih dirasakan kurang untuk mengelola kawasan konservasi seluas 27.502.019,16 hektar. Kekurangan pegawai sangat dirasakan untuk jabatan Polisi Kehutanan, khususnya. Berdasarkan

hasil analisis, secara umum perbandingan polisi kehutanan dengan luas kawasan konservasi yang dikelola yaitu 1: 12.815,48 ha, atau setiap personil polisi kehutanan bertanggungjawab untuk 12.815,48 ha luasan kawasan konservasi. Penambahan pegawai diperlukan sehingga proporsi jumlah pegawai terhadap luas kawasan yang dikelola menjadi proporsional.



Air Terjun Kobe
© Raduan
TN Aketajawe Lolobata

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tk. capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE. Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016. Terdapat dua sasaran dan tiga indikator kinerja yang diemban oleh Ditjen KSDAE yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 adalah pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. Triliun	5	6,5	130,95
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan mancanegara	250.000	481.518	150 (192,61)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan nusantara	4.000.000	7.698.550	150 (192,46)
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (usaha pariwisata alam sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit)	Unit	26	122	150 (395,00)
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik)	Unit KK	50	29	58
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang	Unit	80	37	46,25

	beroperasi				
	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>)	%	2	3,95	150 (197,5)
	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	Unit	13	8	61,54
	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	6	85,71
Rata-rata Capaian Kinerja Program					109,16

Hingga triwulan II tahun 2017, capaian indikator kinerja program Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Program Ditjen KSDAE Tahun 2017

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Satuan	Target s/d 2017	Realisasi			
				s/d 2016	Realisasi TW. II 2017	Total s/d TW II 2017	%
1	2	3	4		5		6
5420	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam						106.65
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam</i>						
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	90	117	10	127	141.11
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	310	236	0	236	76.13
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521	521	521	521	100.00
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	100	71	0	71	71.00
5	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	60	58	33	91	151.67

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Satuan	Target s/d 2017	Realisasi			
				s/d 2016	Realisasi TW. II 2017	Total s/d TW II 2017	%
6	Jumlah Peta RBI Skala 1:50.000 pada 551 Kawasan Konservasi di seluruh Indonesia	KK	551	0	551	551	100.00
5421	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi						72.21
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru</i>						
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	150	40	0	40	26.67
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	90	65	0	65	72.22
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	60.000	9.225.87	803.28	10.029	16.72
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	Desa	77	97	27	124	161.04
5	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Ha	60.000	54.937.73	0	54.937.73	91.56
6	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	100	49	0	49	49.00
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34	21	9	30	88.24
5422	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik						144.82
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik</i>						
1	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	6	30.84	0	30.84	514.00
2	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Spesies	6	8	1	9	150.00
3	Jumlah sertifikasi penangkaran yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	Unit	30	20	0	20	66.67
4	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	Rp. Triliun	15	11.83	2	13.81	92.07
5	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	30	30.274	10.30	40.57	135.25
6	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	6	1	7	100.00
7	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang	PIC	5	9	1	10	200.00

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Satuan	Target s/d 2017	Realisasi			
				s/d 2016	Realisasi TW. II 2017	Total s/d TW II 2017	%
	diterbitkan sebanyak 10 PIC						
8	Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	PRG	12	9	3	12	100.00
9	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	Unit	1	1	0	1	100.00
10	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Unit	30	18	0	18	60.00
11	Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	Kertas Posisi	4	0	3	3	75.00
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi						357.74
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</i>						
1	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	800.000	691.654	59.762	751.416	93.93
2	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	11.500.000	11.736.000	1.828.571	13.564.571	117.95
3	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	60	620	53	673	1121.67
4	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	15	117	10	127	846.67
5	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	25	42	14	56	224.00
6	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	2	1	1	2	100.00
7	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	Unit	0	0	0	0	0.00
5424	Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial						44.36
	<i>Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial</i>						
1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	KEE	39	18	0	18	46.15
2	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	Paket Data	30	16	2	18	60.00
3	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Dokumen	30	4	3	7	23.33

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Satuan	Target s/d 2017	Realisasi			
				s/d 2016	Realisasi TW. II 2017	Total s/d TW II 2017	%
4	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	Kawasan	4	-	0	0	0.00
5	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	Ekoregion	2	1	0	1	50.00
6	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	Spesies	180	156	0	156	86.67

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 sebesar **Rp. 1.284.235.032.000,-**, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.126.868.520.807,-** atau **87,75%%** (Sumber: SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 3 Februari 2017). Pada tahun 2016 terdapat kebijakan penghematan (*self blocking*) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2. Pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar **Rp. 124.065.791.000,-**. Besarnya *self blocking* ini mempengaruhi persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE. Jika menggunakan pagu dikurangi self blocking yaitu sebesar **Rp. 1.159.969.241.000,-** maka persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **97,15%**. Rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Dibandingkan Pagu Awal	% Realisasi Dibandingkan Pagu Dikurangi SB
1	5419 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	62.152.214.000	59.738.013.000	58.012.729.136	93,34	97,11
2	5420 Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam	10.936.551.000	8.696.551.000	8.461.531.282	77,37	97,30
3	5421 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	27.326.950.000	25.676.950.000	12.747.804.407	46,65	49,65

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Dibandingkan Pagu Awal	% Realisasi Dibandingkan Pagu Dikurangi SB
4	5422 Konservasi Spesies dan Genetik	18.335.053.000	16.694.844.000	16.520.811.396	90,11	98,96
5	5423 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	9.187.220.000	6.817.220.000	6.733.436.770	73,29	98,77
6	5424 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	7.779.138.000	5.978.709.000	5.592.888.791	71,90	93,55
7	5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	503.626.437.000	455.072.677.000	448.010.757.281	88,96	98,45
8	5426 Pengelolaan Taman Nasional	644.891.469.000	581.294.277.000	570.788.561.744	88,51	98,19
	Jumlah	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15

Keterangan: SB = *Self Blocking*

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tertinggi adalah untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (93,34%) jika menggunakan pagu awal. Sedangkan jika menggunakan pagu dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (98,96%) dan realisasi terendah pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru (49,65%). Rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut karena terdapat penambahan pagu HLN sebesar Rp. 19,2 Milyar, yang sampai dengan akhir tahun belum dapat sepenuhnya terealisasi.

Sementara itu, untuk tahun 2017, pagu Direktorat Jenderal KSDAE yaitu sebesar **Rp.1.835.700.296.000,-** dan penyerapan hingga tanggal 4 Oktober 2017, yaitu sebesar **Rp.1.071.469.881.260,-** atau **58.37%** (Sumber: Online Monitoring SPAN). Rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Tanggal 13 Oktober 2017 Berdasarkan Kegiatan

No	Kode Jenis Kegiatan	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Total (Rp.)	Realisasi Total (Rp.)	%
1	5419	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM	936.032.758.000	674.490.905.767	72.06
2	5420	PENGLOLAAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	19.627.745.000	10.896.881.228	55.52
3	5421	PENGLOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU	22.836.522.000	3.821.940.862	16.74
4	5422	KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	22.328.436.000	6.537.119.752	29.28
5	5423	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI	9.142.082.000	5.289.811.422	57.86

6	5424	PEMBINAAN KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL	5.300.000.000	2.239.893.764	42.26
7	5425	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	273.876.319.000	141.671.291.303	51.73
8	5426	PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL	546.556.434.000	276.890.596.692	50.66
		JUMLAH	1.835.700.296.000	1.121.838.440.790	61.11



Elephas maximus sumatrensis
© Ahtu Trihangga
TN Gunung Leuser

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Saat ini pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Tujuan Pembangunan KSDAE adalah Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Ekosistem, Spesies dan Sumber Daya Genetik untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam hayati dan keseimbangan ekosistem untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, melalui Sasaran Program:

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Tahun 2018 mekanisme pencapaian pembangunan mengalami perubahan, hal ini seiring dengan penerapan perencanaan yang tematik-holistik, integratif dan spasial. Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program*. Perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*) dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi).

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan 4 (empat) Prioritas Nasional (PN). Keempat Prioritas Nasional tersebut yaitu Kesehatan, Pariwisata dan Dunia Usaha, Ketahanan Energi dan Pembangunan Wilayah. Pada pelaksanaannya, pencapaian program prioritas nasional ini diarahkan pada satker lingkup Ditjen KSDAE, sehingga satker yang menjadi lokus prioritas pelaksanaan pencapaian program prioritas nasional akan mendapatkan prioritas dalam pengalokasian anggaran.

- 1. Prioritas Nasional Kesehatan.** Sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 1) Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu, 2) Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu, dan 3) Pengamanan kawasan TN Lore Lindu.
- 2. Prioritas Nasional Pariwisata dan Dunia Usaha.** Sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 1) Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, 2) Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dan 3) Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya.
- 3. Prioritas Nasional Ketahanan Energi.** Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro). Prioritas ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pemanfaatan energi air pada kawasan konservasi mulai dari tahapan awal (penguatan kelembagaan, koordinasi pemanfaatan sumber daya air, dll) sampai implementasinya.

4. Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah. Kegiatan yang dilakukan oleh KSDAE termasuk ke dalam 2 (dua) program prioritas, yaitu: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembangunan Perdesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam program prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, yaitu: 1) Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi, dan 2) Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional. Sedangkan untuk program prioritas Pembangunan Perdesaan, yaitu: 1) Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat, 2) Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan Konservasi, 3) Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, 4) Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat, 5) Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat, 6) Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat, 6) Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi (Sarana prasarana *Wildlife Rescue Unit* (WRU)), 7) Jumlah *Wildlife Rescue Unit* yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat.

Pagu anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2018 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan). Sesuai dengan RKP 2018, pagu anggaran tahun 2018 sebesar **Rp 2.033.159.356.000,-**. Pagu anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi

penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2018, pagu anggaran Ditjen KSDAE sebesar Rp.2.033.159.356.000,- dengan rincian per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Rincian Pagu Anggaran Ditjen KSDAE 2018 per Kegiatan

(x Rp.1.000,-)

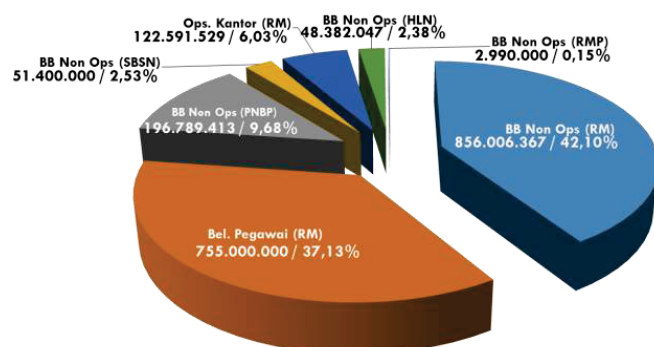
No	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA PRIORITAS NASIONAL	BELANJA PRIORITAS BIDANG	TOTAL
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				18.771.700	18.771.700
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi			56.150.000	19.961.000	76.111.000
3	Konservasi Spesies dan Genetik			25.256.000	7.559.000	32.815.000
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				6.760.000	6.760.000
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial				5.341.000	5.341.000
6	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati			345.079.020	30.447.000	375.526.020
7	Pengelolaan Taman Nasional			514.954.980	103.104.047	618.059.027
8	Dukungan Manajemen	755.000.000	122.591.529		22.184.080	899.775.609
Total		755.000.000	122.591.529	941.440.000	214.127.827	2.033.159.356

Dari Pagu Anggaran Ditjen KSDAE tersebut, pada tahun anggaran 2018 ini seluruh Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) dikumpulkan di satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sehingga anggaran yang ada di satuan kerja adalah Anggaran Belanja Non Operasional. Hal ini turut mendukung arahan Presiden RI tentang proses penganggaran *money follow program* (prioritas nasional) pada RKP tahun 2018.

Tabel 10. Pagu Indikatif Tahun 2018 Ditjen KSDAE per Jenis Belanja & Sumber Dana

(x Rp.1.000,-)

No.	Jenis Belanja	RM	RMP	PNBP	HLN	SBSN	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai	755.000.000	-	-	-	-	755.000.000	37.13%
2	Belanja Operasional	122.591.529	-	-	-	-	122.591.529	6.03%
3	Belanja Non OPS/Modal	856.006.367	2.990.000	196.789.413	48.382.047	51.400.000	1.155.567.827	56.84%
	Total Pagu Anggaran	1.733.597.896	2.990.000	196.789.413	48.382.047	51.400.000	2.033.159.356	100%
	% Per Sumber Dana	85.27%	0.15%	9.68%	2.38%	2.53%	100%	



Gambar 6. Persentase Jenis Belanja Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2018

Belanja Non Operasional senilai Rp. 1.155.567.827.000,- atau sebesar 56.84% dari total pagu anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2018.



Gambar 7. Prioritas Nasional dan kegiatan lainnya yang didukung Ditjen KSDAE pada RKP 2018



Pantai Karang Sewu
© Ganda Diarsa Utara
TN Bali Barat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Namun demikian, apabila sekiranya diperlukan penyempurnaan dikarenakan adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta Rancangan APBN Tahun 2018, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif. Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2018 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018, beserta seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, baik di pusat maupun di daerah.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya,

perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

**LAMPIRAN RENCANA KERJA
DITJEN KSDAE 2018**

Lampiran 1

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2018

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Kementerian/Lembaga | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2. | Program | : | Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |
| 3. | Sasaran Program | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati; |

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem												
1	Konservasi Spesies dan Genetik											
	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Percentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN <i>Red List of Threatened</i> Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	Direktorat KKH	2%	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		676,0
	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013											
		Jumlah sertifikat penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	Direktorat KKH	10 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		670,0
	Jumlah Nilai Ekspor dan PNBP dari Pemanfaatan TSL dan Bioprospecting											
			Direktorat KKH	5 Trilyun Rupiah	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		713,0
2.033.159,356												32.815,0

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun		5 Trilyun Rupiah							
			Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M		10 Milyar Rupiah							
			Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	Direktorat KKH	7 paket data ekoregion	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		510,0
			Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	Direktorat KKH	2 PIC	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		350,0
			Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Reayasa Genetik	Direktorat KKH	4 PRG	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		1.450,0
			Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	Direktorat KKH	1 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		200,0
			Jumlah pusat Pengembangan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Direktorat KKH	10 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		110,0
			Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	Direktorat KKH	4 kertas posisi	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		1.550,0

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN <i>Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		2%							
			Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU))	Direktorat KKH	10 unit	BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Jawa Barat, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Kalimantan Utara, BKSDA Kepulauan Riau, BKSDA Lampung, BKSDA Maluku, BKSDA Maluku Utara, BKSDA Papua Barat, BKSDA Papua, BKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Utara, BKSDA Yogyakarta	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		21.050,0
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		2%							
			Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU))	Direktorat KKH	2 unit	TN Bukit Barisan Selatan, TN Bukit Tiga Puluh	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		4.206,0
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		2%							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)	
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi												76.111,0
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	Jumlah Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi non taman nasional	Direktorat KK	26 unit manajemen	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pencegahan dan Penanggulangan an Bencana	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pencegahan dan Penanggulangan an Kebakaran Hutan dan Lahan			17.200,0	
		• Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi		34 provinsi									
		Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi KK di Taman Nasional	Direktorat KK	48 unit manajemen	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pencegahan dan Penanggulangan an Bencana	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pencegahan dan Penanggulangan an Kebakaran Hutan dan Lahan			38.950,0	
		• Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi		34 provinsi									
	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks ME TT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Direktorat KK	50 dokumen	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		740,0	
	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks ME TT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Direktorat KK	100 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		550,0	
	Mitigasi perubahan Iklim	Jumlah kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Direktorat KK	40.000 hektar	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		900,0	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Luas akses masyarakat dalam memanfaatkan potensi kawasan konservasi	Direktorat KK	100.000 hektar	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		429,05
			Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat		20.000 hektar							
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 unit KPHK	Direktorat KK	60 KPHK	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	400,0
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi		224 kejadian							
			Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa		159 kelompok							
3	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi	Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	Direktorat KK	1 kegiatan	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		15.580,0
			Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok		30 dokumen							
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia		110 unit							
18.771,7												
			Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Direktorat PIKA	30 dokumen	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		1.521,84
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Direktorat PIKA	110 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		1.196,13

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
	alam		Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Direktorat PIKA	521 paket data	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		756,17
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Direktorat PIKA	7 KPHK	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		318,21
			Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	Direktorat PIKA	20 PKS	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		1.518,34
			Jumlah data spasial zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam peta RBI Skala 1:50.000 (<i>One Map Policy</i>) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Direktorat PIKA	551 Kawasan Konservasi	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		707,17
			<i>Forest Programme III</i> (Direktorat PIKA)	Direktorat PIKA	1 kegiatan	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		11.000,0
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi											
	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional	Direktorat PJLHK	4.350.000 orang	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		2.200,0
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara		450.000 orang							
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara		4.000.000 orang							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari <i>baseline</i> tahun 2013	Direktorat PJLHK	20 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		983,0
			Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Direktorat PJLHK	5 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		550,0
			Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Direktorat PJLHK	35 kWatt	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		700,0
			Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Direktorat PJLHK	1 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		550,0
			Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD pada 2 Unit KK	Direktorat PJLHK	1 unit	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		600,0
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial											5.341,0
	Terselenggara nya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial		Jumlah KEE yang memiliki lembaga dan difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	Direktorat BPPE	10 KEE	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		2.141,0
			Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 dokumen	Direktorat BPPE	10 dokumen	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		250,0

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	Direktorat BPEE	2 dokumen	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		900,0
			Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 ekoregion	Direktorat BPEE	2 dokumen	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		400,0
			Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	Direktorat BPEE	14 dokumen	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		400,0
			Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman Kehati sebanyak 300 spesies	Direktorat BPEE	60 spesies	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		450,0
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem											22.714,77
			Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Setdijen KSDAE	77,75 poin	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		19.120,78
			Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Setdijen KSDAE	1 layanan	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		530,69
			Layanan Internal (Overhead)	Setdijen KSDAE	1 layanan	Pusat (Jakarta)	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		3.063,3
												367.802,37
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati											
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	26 UPT KSDA	119 unit	26 UPT KSDA	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan	Peningkatan akses masyarakat dalam		17.468,55

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
		konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan	- Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia - Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia - Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK - Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS - Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	30 dokumen					termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	pengelolaan hutan		

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 dokumen								
			Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	26 UPT KSDA	95 unit	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		9.792,24
			Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan Konservasi kawasan Konservasi Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	26 UPT KSDA	75.026 hektar	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan kawasan termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan dan Perencanaan kawasan Hutan		19.642,967
			Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan Konservasi kawasan Konservasi Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	26 UPT KSDA	117 kelompok	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan kawasan termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		31.454,72
			Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	26 UPT KSDA	123 kejadian	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan kawasan termasuk kawasan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		32.834,81

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			- Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi - Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	34 provinsi					Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan			
			- Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat - Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	26 UPT KSDA	9.278 hektar	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan kawasan termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan		19.388,64
			- Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat - Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 - Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	26 UPT KSDA	2%	26 UPT KSDA	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan kawasan termasuk kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		28.253,57

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	BKSDA Jatim, BKSDA NTT, BKSDA Riau, BKSDA Sulsel, BKSDA Sumut, BKSDA Bengkulu, BKSDA D.I. Yogyakarta, BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Jambi, BKSDA Kalbar, BKSDA Kalsel, BKSDA Kaltim, BKSDA Maluku	2 spesies	BKSDA Jatim, BKSDA NTT, BKSDA Riau, BKSDA Sulsel, BKSDA Sumut, BKSDA Bengkulu, BKSDA D.I. Yogyakarta a. BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Jambi, BKSDA Kalbar, BKSDA Kalsel, BKSDA Kaltim, BKSDA Maluku	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		7.152,44
			7 paket data									

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	26 UPT KSDA	10 Miliar Rupiah	26 UPT KSDA	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		1.540,74
			Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	TWA Holiday Resort, TWA Lau Debuk- TWA Sibolangit, TWA Sicke- TWA Sibolangit, TWA Aek Nauli, TWA Pulau Weh, TWA Kep. Banyak	7 unit	TWA Holiday Resort, TWA Lau Debuk- TWA Sibolangit, TWA Sicke- TWA Sibolangit, TWA Aek Nauli, TWA Pulau Weh, TWA Kep. Banyak	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Danau Toba	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata		31.773,53
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara		450.000 orang							
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara		4.000.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	TWA Telogo Pengilon, TWA Guci, TWA Sumber Semen, TWA Gunung Selok	2 unit	TWA Telogo Pengilon, TWA Guci, TWA Sumber Semen, TWA Gunung Selok	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Borobudur	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata		13.734,68
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara		450.000 orang							
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara		4.000.000 orang							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013				20 unit							
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya			TWA Tanjung Tampa, TWA Gunung Tunak, TWA Kerandangan , TWA Suranadi, TWA Danau Rawa Taliwang,	7 unit	TWA Tanjung Tampa, TWA Gunung Tunak, TWA Kerandangan, TWA Suranadi, TWA Danau Rawa Taliwang, TWA Pulau Moyo, TWA Satonda, TWA Semongkat	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan n 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan n Mandalika	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata		24.436,50
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1.5 juta orang wisatawan mancanegara				450.000 orang							
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara			TWA Pulau Moyo, TWA Pulau Satonda, TWA Semongkat	4.000.000 orang	Danau Rawa Taliwang, TWA Pulau Moyo, TWA Pulau Satonda, TWA Semongkat						
	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013				20 unit							
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi			22 UPT KSDA selain Prioritas Nasional	22 unit	22 UPT KSDA selain Prioritas Nasional	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan n 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Dukungan pengembangan destinasi prioritas	Penciptaan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan		96.885,81
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1.5 juta orang wisatawan mancanegara				450.000 orang							
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara				4.000.000 orang							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			- Energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di kawasan konservasi - Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	SM Tanjung Peropa, SM Buton Utara, TWA Mangolo, TWA Ruteng	70 kWatt 5 unit	SM Tanjung Peropa, SM Buton Utara, TWA Mangolo, TWA Ruteng	Ketahanan Energi	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir	Pembangunan PLT Berbasis Hidro		5.000,0
			- Kelengkapan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi - Jumlah KEE yang memiliki lembaga dan difasilitasi pembentukannya	6 UPT KSDA 	6 unit 4 unit	6 UPT KSDA	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		709,36
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	26 UPT KSDA	77,75 poin	26 UPT KSDA	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		24.830,89
8	Pengelolaan Taman Nasional											
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragam		Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	48 UPT TN 	48 unit 10 dokumen	48 UPT TN	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		23.206,63

625.251,98

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
		an havati di dalam dan di luar kawasan hutan	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia		10 unit							
			Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia		50 paket data							
			Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS		20 PKS							
			Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia		10 unit							
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan		10 dokumen							
			Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi di Taman Nasional	48 UPT TN	48 unit	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pencegahan dan Penanggulangan an Bencana	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Hutan dan Lahan		20.587,10
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi		34 provinsi							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional • Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	48 UPT TN	25.905,92 hektar 50 desa	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim		40.977,51
			Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan taman nasional • Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	48 UPT TN	237 kelompok 50 desa	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		58.841,21
			Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat • Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi • Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	48 UPT TN	141 kejadian 34 provinsi 1.200 orang	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		64.420,11

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	48 UPT TN	30.722 hektar	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim		53.112,81
			Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha		20.000 hektar							
			Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	48 UPT TN	2%	48 UPT TN	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		47.176,69
			Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		2%							
			Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi		7 paket data							
			Jumlah pusat pengembangan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.		10 unit							
			Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	BTN Bukit Tigapuluh; BBTN Bukit Barisan Selatan	2 unit	WRU = (BTN Bukit Tigapuluh; BBTN Bukit Barisan Selatan)	Pembangunan wilayah	Pembangunan perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		1.160,00

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		2%				dan Sumber Daya Hutan			
			Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013		2 spesies							
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	BTN Gunung Leuser, BTN Batang Gadis	2 unit	TN Gunung Leuser, TN Batang Gadis	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	10.588.82
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara		450.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		4.000.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Merbabu	2 unit	TN Gunung Merapi, TN	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	12.060.00

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara		450.000 orang	Gunung Merbabu				wisata		
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara		4.000.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	BTN Gunung Rinjani, BTN Gunung Tambora, BTN Bali Barat	3 unit	TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora, TN Bali Barat	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Mandalika	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata		25.850.00
			Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara		4.000.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	38 UPT TN selain Prioritas	38 unit	38 UPT TN selain Prioritas	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	Dukungan pengembangan destinasi	Penciptaan destinasi bersih, sehat,		140.084.67

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			- Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara - Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara - Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Nasional	450.000 orang	Nasional		(dari 10)	prioritas	dan berkelanjutan		
			- Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara - Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		4.000.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			- Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara - Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara - Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	BTN GGP, BTN	3 unit	TN GGP, TN	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas			51.400,00
			- Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara - Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara - Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Aketajawe Lolobata, BTN Baluran	450.000 orang	Aketajawe Lolobata, TN Baluran						
			- Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara - Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		4.000.000 orang							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013		20 unit							
			Energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di taman nasional	BTN Bukit Tigapuluh, BTN Gunung	9.145 kWatt	TN Bukit Tigapuluh, TN	Ketahanan Energi	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan	Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir	Pembangunan PLT Berbasis Hidro		7.300,00

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)		
			Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	Palung, BTN Gunung Rinjani, BTN Bukit Barisan Selatan, BTN Kerinci Seblat, BTN Gunung Leuser, BTN Aketajawe Lolobata, BTN Batang Gadis, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BTN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti, TN Manusela	10 unit	Gunung Palung, TN Gunung Rinjani, TN Bukit Barisan Selatan, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Leuser, TN Aketajawe Lolobata, TN Batang Gadis, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti, TN Manusela		Konservasi Energi						
				Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	BTN Lore Lindu	400 hektar	TN Lore Lindu	Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i>		6.000.00	
				• Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha		20.000 hektar								
				Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	BTN Lore Lindu	300 hektar	TN Lore Lindu	Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i>		6.000.00	
				• Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha		20.000 hektar								

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Unit Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Tematik	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)
			Pengamanan Kawasan TN Lore Lindu	BTN Lore Lindu	217.991,18 hektar	TN Lore Lindu	Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i>		4.000.00
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi		34 provinsi							
			Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat	BTN Kerinci Seblat	1 kegiatan	TN Kerinci Seblat	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		8.910.00
			Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)	BTN Lore Lindu	1 kegiatan	TN Lore Lindu	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		8.800.00
			Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum)	BTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	1 kegiatan	TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		7.082.05
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	48 UPT TN	77,75 poin	48 UPT TN	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		24.000,0

Matrik Struktur Pencapaian IKK Direktorat Jenderal KSDAE

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
1	Konservasi Spesies dan Genetik				
	Persentase peningkatan populasi spesies terancam punah secara kolaboratif bersama masyarakat	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2 %	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi	
	Jumlah Nilai Ekspor dan PNB dari Pemanfaatan TSL dan <i>Bioprospecting</i>	Nilai ekspor TSL dan <i>Bioprospecting</i>	5 Trilyun Rupiah	051. Penyusunan Juknis PP 12 thn 2014 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi 054. Penentuan Kuota Ekspor 055. Pemeliharaan Sistem Perizinan Online	
	Jumlah Hasil Assesment Aman Lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetika	Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	051. Penyusunan NSPK Pemetaan Zoonosis dan Pemetaan IAS 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 055. Operasional Komisi Keamanan Hayati PRG	
				056. Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati 057. Monitoring dan Evaluasi	
	Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	Jumlah kertas posisi Indonesia di Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati	4 kertas posisi	051. Koordinasi dan Konsultasi 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Diseminasi dan Penyebarluasan Informasi 054. Perundingan Internasional	
	Jenis/spesies yang meningkat populasinya pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari <i>baseline</i> tahun 2013	6 spesies	051. Penyusunan NSPK 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi 054. Pembinaan dan Koordinasi 055. Monitoring dan Evaluasi	

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
	Jumlah Penangkar yang tersertifikasi untuk melakukan peredaran TSL	Jumlah Penangkar yang tersertifikasi untuk melakukan peredaran TSL	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 unit	051. Penyusunan NSPK 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Assesment Penangkaran 055. Audit Penangkaran 056. Monitoring dan Evaluasi
	Data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 paket data ekoregion	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 056. Monitoring dan Evaluasi
	Sistem basis data balai kliring nasional	Sistem basis data balai kliring nasional	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 unit	051. Penyusunan NSPK 054. Operasional Balai Kliring ABS
	Jumlah Suaka satwa (<i>Sanctuary</i>) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata	Jumlah Suaka satwa (<i>Sanctuary</i>) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata	Jumlah pusat pengembangan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	10 unit	051. Penyusunan NSPK 055. Monitoring dan Evaluasi
	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	2 PIC	051. Penyusunan NSPK 053. Monitoring dan Evaluasi
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional (Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU))	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional (Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU))	Jumlah Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU) di UPT KSDA	10 unit	051. Pembelian Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU) 052. Penyusunan NSPK 053. Monitoring Implementasi IBSAP 054. Peningkatan Kapasitas SDM 055. Kampanye dan Sosialisasi 056. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan 057. Repatriasi dan Pelepaslaran
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman	Jumlah Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU) di UPT Taman Nasional	2 unit	051. Pembelian Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU) 052. Kampanye dan Sosialisasi 053. Peningkatan Kapasitas SDM

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
	nasional (Sarana prasarana <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU))	Layanan Internal (Overhead)		1 layanan	054. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan
					055. Repatriasi dan Pelepasliaran
					051. Penyelenggaraan Ketatausahaan Direktorat
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi				
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 unit KK		051. Penyusunan NSPK
					052. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					053. Pembinaan dan Koordinasi
					054. Penyusunan Baseline dan updating Data METT
					055. Verifikasi Hasil <i>Self Assessment</i> METT
					056. Monitoring dan Evaluasi
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	50 dokumen		051. Penyusunan NSPK
					052. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					053. Pembinaan dan Koordinasi
					054. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan
					055. Fasilitas Review Dokumen Rencana Pengelolaan
					056. Monitoring dan Evaluasi
	Luas kawasan konservasi yang dipulihkan	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	40.000 hektar		051. NSPK Restorasi
					052. Penyusunan Sistem Monitoring PE
					053. Pembinaan dan Koordinasi dengan Instansi Lain
					054. Pendampingan RPE TNLL (Prinas)
					055. Peningkatan Kapasitas SDM
					056. Monitoring dan Evaluasi
	Jumlah usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	159 kelompok		051. Penyusunan NSPK
					052. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					053. Penetapan Desa binaan
					054. Monitoring dan Evaluasi
	Luas akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan konservasi	Luas akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan konservasi	100.000 hektar		051. Penyusunan NSPK
					052. Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional
					053. Pengembangan Kemitraan
					054. Penetapan pengelolaan zona tradisional melalui kemitraan

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
					055. Updating Database
					056. Pembinaan dan Koordinasi
					057. Monitoring dan Evaluasi
					051. Penilaian Operasionalisasi KPHK
					052. Sosialisasi peraturan pengelolaan KPHK
					053. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					054. Pembinaan dan Koordinasi
					055. Monitoring dan Evaluasi
					051. Penyusunan NSPK
					052. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					053. Pembinaan dan Koordinasi
					054. Pengembangan Sistem Money
					055. Fasilitas penanganan permasalahan perlindungan dan pengamanan kawasan
					056. Sarana Prasarana perlindungan dan pengamanan KK
					057. Kesiapsiagaan penanganan gangguan kawasan (<i>on call budget</i>)
					051. Pembelian Sarana Prasarana
					Pengendalian Kebakaran Hutan
3	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				051. Pembelian Sarana Prasarana
					Pengendalian Kebakaran Hutan
					051. Kegiatan
					<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem</i>
					051. Penyelenggaraan Ketatausahaan
					Direktorat
					051. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					053. Finalisasi <i>One Map Policy</i>
					054. Koordinasi dan Konsultasi
					551 Kawasan Konservasi
					Jumlah data spasial zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (<i>One Map Policy</i>) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat
					Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat
					Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat
					Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat
					Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat
					Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat
					Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Rekomendasi hasil evaluasi fungsi Kawasan Konservasi	masyarakat desa/adat	110 unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia		052. Pembinaan dan Koordinasi
					053. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
					054. Monitoring dan Evaluasi
			Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i>	521 paket data	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi
			Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia		052. Updating Sistem IKA
					053. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA
					054. Monitoring dan Evaluasi
			Kerjasama pembangunan dan penguatan pada Kawasan Konservasi	20 PKS	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi
			Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS		052. Pembinaan dan Koordinasi
					053. Monitoring dan Evaluasi
			Dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	30 dokumen	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi
			Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok		052. Pembinaan dan Koordinasi
					053. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok
					054. Monitoring dan Evaluasi
			Reviu penetapan 100 unit KPHK dan usulan baru	7 KPHK	051. Pembinaan dan Koordinasi
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK		052. Penilaian Rancang Bangun KPHK
					053. Penetapan KPHK
					054. Monitoring dan Evaluasi
			<i>Forest Programme III</i> (Direktorat PIKA)	1 kegiatan	051. <i>Forest Programme III</i> Direktorat PIKA
			Layanan Internal (Overhead)	1 layanan	051. Penyelenggaraan Ketatausahaan Direktorat
					995. Pengadaan Kendaraan Bermotor
					996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
			Jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional	4.350.000 orang	051. NSPK Juknis dan Juklak
					052. Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam
					053. Kajian Kebutuhan Infrastruktur Ekowisata dan pendanaannya seluruh

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
					Indonesia 2020-2024
					054. Pembinaan dan Koordinasi
					055. Pencermatan Usulan Design Tapak dan DED Sarpras Wisata Alam
					056. Pelaksanaan HKAN dan Jambore
					057. Pengembangan sistem e-PNBP Wisata Alam
					058. Monitoring dan Evaluasi
	Jumlah unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit		051. Penyusunan NSPK
					052. Pembuatan Aplikasi Pemantauan IUPSWA dan IUPJWA (Pelaporan Online)
					053. Penilaian Pengusahaan Wisata Alam
					054. Pembinaan dan Koordinasi
					055. Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam
					056. Evaluasi Izin Usaha Pariwisata
	Jumlah unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di Kawasan Konservasi	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 unit		051. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					052. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Air
					053. Monitoring dan Evaluasi
	Pemanfaatan jasa lingkungan energi air di kawasan konservasi (mini/mikrohidro)	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	35 kWatt		051. NSPK Mikrohidro berbasis masyarakat
					052. Pencermatan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air
					053. Fasilitas Demplot Mikrohidro di UPT
					054. Pengelolaan Kawasan Terkait Potensi Air
					055. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air
					056. Apresiasi masyarakat konservasi Sumber Daya Air
					058. Monitoring dan Evaluasi
	Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 unit		053. <i>Update</i> data dan informasi potensi panas bumi
					055. Pembinaan dan Koordinasi
					056. Monitoring dan Evaluasi
	Registrasi atau sertifikasi karbon di kawasan konservasi	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i>	1 unit KK		053. Pengembangan kerjasama nasional dan internasional (mendukung IJREDD)
					055. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					056. Pembinaan dan Koordinasi

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Jumlah Forum Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	10 unit KEE	057. Monitoring dan Evaluasi
					051. Penyelenggaraan Ketatausahaan Direktorat
					995. Pengadaan Kendaraan Bermotor
	Paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	14 dokumen	14 dokumen	051. Koordinasi Perlindungan KEE
					052. Penyusunan NSPK
					053. Penyusunan Pola KEE
					054. Bimbingan Teknis dan Supervisi
					055. Perundingan Internasional
					056. Evaluasi Perlindungan KEE
	Rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	051. Konsultasi penyusunan rencana aksi
					052. Sosialisasi Rencana Aksi
					053. Monitoring dan Evaluasi
	Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	2 dokumen	2 dokumen	051. Penataan Ekosistem Karst
					052. Sosialisasi Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst
					053. Monitoring dan Evaluasi
					054. Bimbingan Teknis dan Supervisi
	Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove	Jumlah kawasan Ekosistem Mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya	2 dokumen	2 dokumen	051. Penataan Ekosistem Mangrove
					052. Sosialisasi Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
					053. Monitoring dan Evaluasi
					054. Bimbingan Teknis dan Supervisi
	Koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman Kehati sebanyak 300 spesies	Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman Kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	60 spesies	051. Fasilitasi DED Taman Keanekaragaman Hayati
					052. Verifikasi Usulan Lokasi KEE
					053. Monitoring dan Evaluasi
					054. Fasilitasi penguatan kelembagaan pengelolaan Taman Kehati
					055. Koordinasi perlindungan KEE
	Layanan Internal (Overhead)		1 layanan		051. Penyelenggaraan Ketatausahaan

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Meningkatnya Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 minimal 78 poin	77,75 poin	Direktorat
					995. Pengadaan Kendaraan Bermotor
					996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
					997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
					998. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
					051. Penyusunan Program dan Anggaran
					052. Evaluasi dan Pelaporan
					053. Data dan Informasi
					054. Kerjasama dan Kemitraan
					055. Administrasi Kepegawaian
				1 layanan	056. Administrasi Jabatan Fungsional
					057. Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan
					058. Administrasi Keuangan
					059. Ketatausahaan dan Umum
					060. Administrasi Perlengkapan
					061. Peraturan Perundang-undangan
					062. Pertimbangan dan Advokasi Hukum
					051. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja
					995. Pengadaan Kendaraan Bermotor
					996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
				1 layanan	997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
					998. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
					999. Dukungan Internal Lainnya
					001. Gaji dan Tunjangan
					002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis	Jumlah penataan zonasi pengelolaan kawasan konservasi TN sebagai informasi	119 unit	051. Rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi
					052. Penyusunan dan pengusulan dokumen

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
	Masyarakat		bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna		zonasi dan/atau blok 053. Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi 054. Inventarisasi potensi kawasan konservasi 055. Penyusunan FS dan DED 056. Daya dukung dan daya tampung lingkungan 057. Evaluasi izin udaha pemanfaatan kawasan 058. Penilaian METT
	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi KK di Kawasan Konservasi non Taman Nasional	95 unit		056. Patroli pemadaman kebakaran hutan konservasi 057. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan di Hutan Konservasi 058. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi	Luas kawasan konservasi non taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	75.026 hektar		051. Inventarisasi dan verifikasi 052. Pembentukan dan pendampingan kelompok 053. Bantuan usaha ekonomi produktif 054. Penanganan keterlanjuran
	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	Prosentase gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 149 kejadian	123 kejadian		051. Patroli fungsional 052. Pembentukan dan penyegaran Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 053. Patroli bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 054. Sarana dan prasarana resort 055. Penanganan barang bukti dan tersangka 056. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
	Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	2.409 hektar		051. Rencana pemulihan ekosistem 052. Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem 053. Pemeliharaan tanaman dalam rangka Pemulihan Ekosistem
	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan TSL	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan	10 Milyar Rupiah	051.	Monitoring TSL yng diperdagangkan untuk pengusulan kuota

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
			tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	054.	Patroli peredaran TSL
	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	051.	Monitoring 25 satwa prioritas
				052.	Pembinaan populasi
				053.	Pembinaan habitat satwa
				054.	Peningkatan kapasitas SDM
				055.	Operasionalisasi <i>sanctuary</i>
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi		Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (<i>shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, MCK, tempat pengolahan sampah, pondok pemandu dll</i>)	051.	Pembangunan sarana dan prasarana wisata
				052.	Pemeliharaan sarana dan prasarana
				053.	Penanganan kunjungan wisatawan
				054.	Promosi wisata kawasan konservasi
				055.	Sarana dan prasarana berbasis masyarakat
	Energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di kawasan konservasi		Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari TWA	051.	Penguatan kelembagaan
				052.	Demplot <i>Microhydro Electrical Powerplant</i>
				053.	Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air
	Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi		Jumlah kawasan yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	051.	Pembentukan kelembagaan
				052.	Identifikasi dan Survey Lokasi potensial KEE
				053.	Rencana aksi
				054.	Penyusunan paket data dan informasi KEE
	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 minimal 78 poin	051.	Program dan Kerjasama
				052.	Data Evaluasi dan Kehumasan
				053.	Ketatausahaan, Kepegawaian dan Umum
	Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas	051.	Pembangunan sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di kawasan Danau Toba
				052.	Pemeliharaan sarana dan prasarana
				053.	Penanganan kunjungan wisatawan
				054.	Promosi wisata kawasan konservasi
				055.	Sarana dan prasarana berbasis masyarakat
	Sarana dan prasarana		Pemenuhan sarpras wisata	051.	Pembangunan sarpras pariwisata pada

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
	ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya		alam yang layak dan memadai di TN Prioritas		kawasan konservasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya
					052. Pemeliharaan sarana dan prasarana
					053. Penanganan kunjungan wisatawan
					054. Promosi wisata kawasan konservasi
					055. Sarana dan prasarana berbasis masyarakat
	Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas	7 unit	051. Pembangunan sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya
					052. Pemeliharaan sarana dan prasarana
					053. Penanganan kunjungan wisatawan
					054. Promosi wisata kawasan konservasi
					055. Sarana dan prasarana berbasis masyarakat
	Jumlah <i>Wildlife Rescue Unit</i> yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat		Pelaksanaan Kegiatan <i>Wildlife Rescue Unit</i> bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	12 unit	051. Penguatan Kelembagaan
					052. Penanganan konflik
					053. Operasional <i>Wildlife Rescue Unit</i> (WRU)/PPS
					051. Inventarisasi dan verifikasi daerah penyangga kawasan
					052. Pembentukan dan pendampingan kelompok
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi Layanan Internal (Overhead)		Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	117 kelompok	053. Bantuan ekonomi produktif
					995. Pengadaan Kendaraan Bermotor
					996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
					997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
					998. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
8	Pengelolaan Taman Nasional				
	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat		Jumlah penataan zonasi pengelolaan kawasan konservasi TN sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA,	48 unit	051. Rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi
					052. Penyusunan dan Pengusulan Dokumen Zonasi dan/atau Blok
					053. Penyusunan dan pengesahan dokumen

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
			pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna		perencanaan pengelolaan kawasan konservasi
					054. Inventarisasi potensi kawasan konservasi
					055. Penyusunan FS dan DED
					056. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
					057. Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
					058. Penilaian METT
	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi di Taman Nasional	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi KK di Taman Nasional		48 unit	056. Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan Konservasi
					057. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan di Hutan Konservasi
					058. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional	Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat		25.905,92 hektar	051. Inventarisasi dan verifikasi
					052. Pembentukan dan pendampingan kelompok
					053. Bantuan peralatan usaha ekonomi produktif
					054. Penanganan keterlambatan
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina		237 kelompok	051. Inventarisasi dan verifikasi daerah penyangga kawasan
					052. Pembentukan dan pendampingan kelompok
					053. Bantuan ekonomi produktif
	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	Prosentase gangguan pada kawasan taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian		141 kejadian	051. Patroli Fungsional Pengamanan Hutan
					052. Pembentukan dan penyelenggaraan MMP
					053. Patroli bersama MMP
					054. Sarana dan Prasarana Resort
					055. Penanganan barang bukti dan tersangka
					056. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
	Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi		9.819,4 hektar	051. Rencana Pemulihan Ekosistem
					052. Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem
					053. Pemeliharaan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem
	Persentase Peningkatan	Persentase peningkatan		2 %	051. Monitoring 25 satwa

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
	Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat		populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		052. Pembinaan populasi 053. Pembinaan habitat 054. Peningkatan kapasitas SDM 055. Operasionalisasi <i>sanctuary</i>
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional		Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (<i>shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge</i> dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional destinasi wisata	38 unit	052. Pemeliharaan sarana dan prasarana 053. Penanganan kunjungan wisatawan 054. Promosi wisata Taman Nasional 055. Pembangunan sarana prasarana wisata berbasis masyarakat
	Energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di taman nasional		Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari Taman Nasional	9.180 kWatt	051. Penguatan kelembagaan 052. Pembangunan Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i>
	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem Tahun 2019 minimal 78,00 Poin	77,75 poin	053. Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Air 051. Program dan Kerjasama 052. Data Evaluasi dan Kehumasan 053. Ketatausahaan, Kepegawaian dan Umum
	Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Danau Toba		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas	2 unit	051. Pembangunan Sarana dan Prasarana ekowisata pada taman nasional 052. Pemeliharaan sarana dan prasarana 053. Penanganan kunjungan wisatawan 054. Promosi wisata Taman Nasional 055. Sarana Prasarana berbasis masyarakat
	Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas	2 unit	051. Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional 052. Pemeliharaan sarana dan prasarana 053. Penanganan kunjungan wisatawan 054. Promosi wisata Taman Nasional 055. Sarana Prasarana berbasis masyarakat
	Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas	3 unit	051. Pembangunan sarana dan prasarana 052. Pemeliharaan sarana dan prasarana 053. Penanganan kunjungan wisatawan 054. Promosi wisata Taman Nasional 055. Sarana Prasarana berbasis masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
	Jumlah <i>Wildlife Rescue Unit</i> yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan <i>Wildlife Rescue Unit</i> bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	2 unit	051. Penguatan Kelembagaan 052. Penanganan konflik 053. Operasional WRU/PPS	
	Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	400 hektar	051. Pembuatan dan Analisis Peta Lokasi Penanaman di <i>Buffer</i> Taman Nasional Lore Lindu 052. Pengadaan bibit 053. Penanaman dan pemeliharaan di TN Lore Lindu 054. Peningkatan kapasitas 055. Penyadaran masyarakat dan visit scholl 056. Pembangunan pembibitan restorasi ekosistem permanen yang dapat dijadikan model	
	Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	300 hektar	051. Prakondisi Kegiatan Restorasi Kawasan Fokus Schistosoma di TNLL 052. Restorasi Kawasan Fokus Schistosoma di Taman Nasional Lore Lindu 053. Pembangunan pembibitan restorasi ekosistem permanen yang dapat dijadikan model	
	Pengamanan Kawasan TN Lore Lindu	Pengamanan Kawasan TN Lore Lindu	217.991,18 hektar	051. Patroli Fungsional 052. Patroli Bersama Masyarakat 053. Pembangunan Pos Pengamanan/Pemantauan Kawasan di Sekitar Area Fokus Sisto 054. Pembuatan Papan Peringatan 055. Monitoring dan Evaluasi	
	<i>Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat</i>		1 kegiatan	051. <i>Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat</i>	
	<i>Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)</i>		1 kegiatan	051. <i>Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)</i>	
	<i>Forest Investment Program -</i>		1 kegiatan	051. <i>Forest Investment Program - Project 1</i>	

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
		Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun Sentarum)			(FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum)
		Sarana Prasarana Ekowisata 3 Taman Nasional Model SBSN		3 unit	Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN
		Layanan Internal (Overhead)		1 layanan	Pengadaan kendaraan bermotor
				051.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
				052.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
				053.	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
				054.	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730301 - 5730316 Faximile : (021) 5733437